



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TRANSFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA: INTEGRASI KURIKULUM NASIONAL DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Implementasi Kurikulum Merdeka (Kurma) dan pendidikan inklusif di Indonesia telah diperkuat secara hukum melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi ini menetapkan arah kebijakan dan menjadi payung hukum untuk penerapan Kurma di tingkat nasional. Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah diterbitkan memberikan arahan yang jelas untuk praktiknya. Landasan konstitusional kedua program ini tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara, menegaskan tanggung jawab negara dalam fungsi pendidikan, dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif.

Kurma yang kini menjadi kurikulum nasional Indonesia, mencakup pendidikan dari anak usia dini hingga jenjang menengah. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kepastian arah kebijakan dalam kurikulum dan pembelajaran. Implementasinya telah dilakukan oleh sekitar 80% satuan pendidikan dan akan terus berlanjut hingga tahun ajaran 2026/2027, dengan daerah 3T diberikan waktu tambahan hingga tahun ajaran 2027/2028.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung Kurma, dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru dan menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas. Program ini berfokus pada keberagaman dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, untuk mengatasi kesenjangan dalam ketersediaan guru pendidikan khusus. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adil bagi semua anak, dengan menghargai dan mengembangkan potensi uniknya, sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kurma dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip pendidikan inklusif, yang menawarkan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Pendekatan ini menghormati keunikan setiap anak dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Sebagai respons terhadap tantangan sistem pendidikan Indonesia, Kurma mengedepankan metode pembelajaran yang fleksibel, fokus pada materi esensial, dan pengembangan karakter serta kompetensi siswa.

Kurma dan pendidikan inklusif merupakan langkah maju dalam transformasi pendidikan, menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan abad ke-21. Program yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada inklusivitas dan adaptabilitas, memperkaya pengalaman belajar, memperkuat kompetensi guru, dan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Langkah ini mendorong metode pembelajaran inovatif, integrasi teknologi, dan penilaian yang mendukung pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Keduanya mempunyai dampak signifikan terhadap sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih inklusif dan adaptif. Perubahan metodologi pengajaran dan penilaian, serta integrasi teknologi, diharapkan membawa perubahan positif.

Meskipun ada tantangan dalam tata kelola dan distribusi guru, literasi digital, dan egosektoral, program ini memiliki peran penting dalam konteks pendidikan abad ke-21 dan visi Indonesia Emas 2045. Integrasi Kurma dengan pendidikan inklusif menawarkan pandangan komprehensif terhadap upaya Indonesia dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan responsif. Langkah ini mencakup adaptasi kurikulum, pendidikan inklusif berkualitas, keterampilan abad ke-21, pendekatan holistik terhadap pendidikan, dan kesiapan masa depan dengan pembelajaran sepanjang hayat.

Pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam implementasi efektif Kurma dan pendidikan inklusif. Pemerintah pusat menyediakan panduan dan materi pembelajaran, pelatihan, serta advokasi dan pendampingan. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas transformasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, infrastruktur, dan digitalisasi layanan sekolah. Peran keduanya menjamin bahwa setiap siswa, tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan berkualitas yang mempersiapkan mereka menjadi warga negara global yang kompeten dan berkontribusi.

Transformasi pendidikan di Indonesia melalui integrasi Kurma dan pendidikan inklusif merupakan langkah strategis yang mencerminkan investasi berkelanjutan dan komitmen terhadap perbaikan yang berkesinambungan. Upaya ini menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat untuk mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan adaptif, yang akan menjadi fondasi bagi generasi emas yang membawa negara ini menuju kemakmuran dan inovasi di masa depan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI mengapresiasi implementasi Kurikulum Merdeka (Kurma) dan pendidikan inklusif sebagai langkah penting menuju pendidikan abad ke-21 dan visi Indonesia Emas 2045. Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pendidikan komprehensif yang inklusif dan adaptif untuk transformasi pendidikan Indonesia, serta mendukung keberlanjutan dan inklusivitas pendidikan melalui legislasi. Komisi X DPR RI telah mengalokasikan Rp23,44 triliun dari anggaran Kemendikbudristek 2024 untuk program prioritas seperti Kurma dan pendidikan inklusif, menekankan penggunaan anggaran yang efektif. Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya kerja sama antarpemerintah dan mengurangi egosektoral untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif di Indonesia. Komisi X DPR RI juga memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi Kurma dan pendidikan inklusif, menampung aspirasi masyarakat terkait implementasi kebijakan ini, serta mengawasi implementasi kebijakan pendidikan pemerintah agar mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan adaptif.

Sumber

antaranews.com, 16 Mei 2023 & 21 Maret 2024;
detik.com, 27 Maret 2024;
ditpsd.kemdikbud.go.id, 28 Maret 2024;
Kemendikbud.go.id, 27 dan 28 Maret 2024;
Kompas.com, 28 Februari 2024;

medcom.id, 27 Maret 2024;
pmpk.kemdikbud.go.id, 21 Maret 2024;
republika.co.id, 27 Maret 2024;
smk10semarang.sch.id, 25 Maret 2024; dan
tirto.id, 4 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<http://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.